**ANALISIS TATA KELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN UNTUK MENYONGSONG MERDEKA BELAJAR**

(Suatu Kasus di SMA Negeri 25 Bandung)

**JURNAL**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Sidang Tesis

Guna Menempuh Gelar Magister Manajemen (M.M)

Pada Program Studi Magister Manajemen

oleh

**TISSA JUNITA**

**198020015**



**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG  
2022**

**ABSTRAK**

Dunia pendidikan saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan dan juga peluang dalam menghasilkan sumber daya yang berkualitas dan mampu menghadapi persaingan global. Kemendikbud mencanangkan reformasi sistem pendidikan Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar. Pendidikan yang bermutu sulit dapat berjalan baik tanpa dukungan biaya yang memadai. Dalam pendidikan yang bermutu pemerintah memberikan atau meringankan biaya pendidikan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). SMA Negeri 25 Bandung merupakan salah satu sekolah negeri yang mendapatkan dana BOS. Pengelolaannya pun sudah seharusnya dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pengelolaan penggunaan dana BOS sehingga dapat memenuhi kebutuhan proses pendidikan kemudian dapat meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji tata kelola dana BOS, kualitas pendidikan untuk menyongsong Merdeka Belajar, dan tata kelola dana BOS dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dalam menyongsong Merdeka Belajar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif sebagaimana yang disarankan oleh (Sugiono, 2016:9) metode kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara tiangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Hasil penelitian menunjukan, SMA Negeri 25 Bandung telah melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan penggunaan dana BOS, telah melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar Episode 1, dan telah melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar Episode 3. Saran yang harus dijadikan pertimbangan adalah publikasi dana BOS dapat diakses oleh media yang mudah diakses oleh masyarakat dimana saja, dan pelaksanaan Assesmen Nasional dilakukan oleh siswa yang dipilih langsung oleh pihak sekolah.

**Kata Kunci:** Dana BOS, Kualitas Pendidikan, Merdeka Belajar

***ABSTRACT***

*The world of education is currently facing various challenges and opportunities in producing quality resources that are able to face global competition. The Ministry of Education and Culture launched the reform of the Indonesian education system through the Independent Learning policy. Quality education is difficult to run well without adequate financial support. In quality education, the government provides or reduces the cost of education through the School Operational Assistance (BOS) program. SMA Negeri 25 Bandung is one of the public schools that received BOS funds. The management should also be carried out with the principles of managing the use of BOS funds so that they can meet the needs of the educational process and then improve the quality of education. This study aims to identify, analyze, and examine the governance of BOS funds, the quality of education to welcome the Freedom of Learning, and the governance of the BOS funds in an effort to improve the quality of education in welcoming the Freedom of Learning. The research method used is a qualitative method as suggested by (Sugiono, 2016:9) a qualitative method based on the philosophy of postpositivism, used to examine the condition of natural objects, (as opposed to an experiment) where the researcher is the key instrument, data collection techniques carried out by mastulation (combined), data analysis is inductive/qualitative, and qualitative research results emphasize meaning rather than generalization. The results show that SMA Negeri 25 Bandung has implemented the principles of managing the use of BOS funds, has implemented the Merdeka Belajar Episode 1 policy, and has implemented the Merdeka Belajar Episode 3 policy. Suggestions that must be taken into consideration are the publication of BOS funds that can be accessed by easy media. accessed by the public in anywhere, and the implementation of the National Assessment is carried out by students who are directly selected by the school.*

***Keywords****: BOS Funds, Quality of Education, Merdeka Belajar*

**Pendahuluan**

Dunia pendidikan saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan dan juga peluang dalam menghasilkan sumber daya yang berkualitas dan mampu menghadapi persaingan global. Di era revolusi industri 4.0 saat ini sistem pendidikan diharapkan mampu mewujudkan generasi yang memiliki keterampilan kreatifitas, inovasi, komunikasi dan mampu memaksimalkan teknologi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan reformasi sistem pendidikan Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim saat berpidato pada acara Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2019 mengakatakan bahwa inti dari Merdeka Belajar adalah sekolah, guru dan murid memiliki kebebasan dalam arti bebas untuk berinovasi, bebas untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Masditou (2017:120) dalam pencapaian pendidikan yang berkualitas, pendidikan mempunyai standar acuan agar tercapainya pendidikan yang diharapkan. Program tersebut disebut Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan. Dengan melaksanakan standarisasi tersebut, diharapkan bisa terjadi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Faktor pembiayaan mempunyai peran penting dalam pemenuhan standarisasi pendidikan. Akan tetapi dengan bervariasinya kebutuhan lembaga pedidikan satu dengan lainnya berbeda-beda dan beragamnya latar belakang finansial orang tua siswa sering kali standarisasi pendidikan tidak terpenuhi.

Menurut Sumarni (2014:85) salah satu komponen instrumental penting dalam proses penyelenggaraan pendidikan adalah unsur biaya. Biaya pendidikan tidak bisa diabaikan dalam penyelenggaraan pendidikan, karena ia menjadi satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas proses dan hasil akhir penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang bermutu sulit dapat berjalan baik tanpa dukungan biaya yang memadai. Lembaga pendidikan akan sangat tergantung pada faktor pembiayaan untuk pemenuhan SNP baik dalam besaran dana, pengalokasian dana yang tepat, maupun realisasi pembiayaan untuk kebutuhan proses pembelajaran.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 11 Ayat 1 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Salah satu peran negara dalam membantu mewujudkan pendidikan yang bermutu adalah dengan memberikan atau meringankan biaya pendidikan di Indonesia melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program BOS wajib dikelola, yang mana dalam pelaksanaannya, penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS. Pengelolaan dana BOS yang baik yaitu dengan melaksanakan prinsip-prinsip penggunaan dana BOS. Selama ini timbul beberapa permasalahan yang terkait dengan proses penyaluran dan alokasi penggunaan dana BOS. Penyaluran dana BOS sering terlambat sampai ke sekolah, sekitar bulan Maret/April, sehingga para Kepala Sekolah sering terpaksa menalangi biaya operasional sekolah pada awal tahun. Keterlambatan penyaluran dana BOS tersebut mengakibatkan gangguan pada proses pembelajaran siswa di sekolah. Tahun lalu, penggunaan dana BOS untuk honor guru dibatasi maksimal 15% untuk sekolah negeri dan 30% untuk sekolah swasta, sehingga Kepala Sekolah tidak mempunyai ruang cukup untuk meningkatkan penghasilan guru-guru honorer di sekolahnya. Akibatnya, banyak guru honorer yang mengabdi tanpa memperoleh penghasilan yang layak. Lebih lanjut, banyak Kepala Sekolah yang tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai tenaga kependidikan, seperti operator, tata usaha, pustakawan, dan sebagainya. (Website Resmi Kemenkeu 2020).

Berdasarkan uraian tersebut di atas menarik minat peneliti untuk menganalisis dana BOS lebih lanjut. Kontribusi peneliti terhadap pengembangan hasil penelitian sejenis adalah dengan penambahan persyaratan dalam pengambilan sampel, yaitu SMA Negeri 25 Bandung yang memenuhi kriteria tertentu seperti : sekolah yang mendapat dana Bantuan Operasional Sekolah, maka judul penelitian ini adalah “Analisis Tata Kelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan untuk Menyongsong Merdeka Belajar: Suatu Kasus di SMA Negeri 25 Bandung”

**Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana tata kelola dana BOS di SMA Negeri 25 Bandung Tahun 2021
2. Bagaimana kualitas pendidikan untuk menyongsong Merdeka Belajar di SMA Negeri 25 Bandung
3. Bagaimana tata kelola dana BOS dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dalam menyongsong Merdeka Belajar di SMA Negeri 25 Bandung

**Tujuan Penelitian**

1. Tata kelola dana BOS di SMA Negeri 25 Bandung Tahun 2021
2. Kualitas pendidikan untuk menyongsong Merdeka Belajar di SMA Negeri 25 Bandung
3. Tata kelola dana BOS dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dalam menyongsong Merdeka Belajar di SMA Negeri 25 Bandung

**Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

* 1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai dana BOS Reguler dan kualitas pendidikan
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya terkait dana BOS Reguler dan kualitas pendidikan
   1. Manfaat Praktis
3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan dana BOS Reguler dan kualitas pendidikan

1. Bagi Orang Tua

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada orang tua siswa mengenai pengelolaan dana BOS Reguler dan kualitas pendidikan

1. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam pengelolaan dana BOS Reguler dan kualitas pendidikan.

**Kerangka Berpikir**

Faktor pembiayaan mempunyai peran penting dalam pemenuhan standarisasi pendidikan. Menurut Sumarni (2014:85) biaya pendidikan tidak bisa diabaikan dalam penyelenggaraan pendidikan, karena ia menjadi satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas proses dan hasil akhir penyelenggaraan pendidikan.

Salah satu peran negara dalam membantu mewujudkan pendidikan yang bermutu adalah dengan memberikan atau meringankan biaya pendidikan di Indonesia melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pengelolaan dana BOS yang baik merupakan suatu keberhasilan lembaga pendidikan dalam mengelola dana BOS dan mampu membantu ketercapaian tujuan pendidikan. Menurut Syahbudin (2019:4) pengelolaan pembiayaan pendidikan mempunyai peran penting terhadap mutu pendidikan sekolah terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar. Pengelolaan dana BOS haruslah disesuaikan dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Masditou (2017:120) mengatakan dalam pencapaian pendidikan yang berkualitas, pendidikan mempunyai standar acuan agar tercapainya pendidikan yang diharapkan. Acuan ini dijadikan standar pada sebuah lembaga pendidikan agar tujuan pendidikan yang berkualitas dapat tercapai. Sehubungan dengan hal itu untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah menerapkan standarisasi sistem pendidikan yang harus diterapkan oleh seluruh instansi pendidikan di Indonesia. Program tersebut disebut Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencanangkan reformasi sistem pendidikan Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan ini merupakan tanggapan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sistem pendidikan Indonesia di era revolusi industri 4.0. Merdeka Belajar yaitu memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai (Kemendikbud, 2020:5). Menurut Baro’ah (2020:1070) kebijakan Merdeka Belajar merupakan strategi peningkatan mutu pendidikan yang menjadi agenda penting pemerintah (Kemendikbud). Berbagai terobosan dan kebijakan telah diambil dalam rangka meningkatkan akses pendidikan yang merata dan bermutu.

Menurut Utari & Septyabi (2021:4) dengan adanya program merdeka belajar ini siswa dapat mencapai tujuan belajar dan keberhasilan dalam sebuah pembelajaran. Merdeka belajar merupakan sebuah trobosan dalam menciptakan manusia yang unggul. Sistem pendidikan merdeka belajar hendaknya dapat menciptakan karakter yang baik pada peserta didik dan memiliki kemampuan dalam berfikir kritis serta dapat memecahkan masalah, memiliki kreatifitas dan berinovasi serta memiliki karakter yang jujur, tanggung jawab, adil, disiplin, beragama, dan lain-lain. Guru merupakan kunci keberhasilan dalam program merdeka belajar. Guru memiliki peran penting dalam proses pendidikan, sehinga guru diharapkan dalam memgemas proses pembelajaran dengan efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik peserta didik dan keadaan lingkungan sekitar. Dapat memilih model dan metode pembelajaran dengan tepat. Dengan hal ini sistem merdeka belajar dapat mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

**Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain. Penelitian ini dilakukan pada SMA Negeri 25 Bandung pendeskripsian difokuskan pada prinsip tata kelola dana BOS Tahun 2021, kebijakan Merdeka Belajar Episode 1 Tahun 2021, dan kebijakan Merdeka Belajar Episode 3 Tahun 2021 Indikator yang diteliti dalam penelitian ini yaitu prinsip fleksibilitas, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, kebijakan Assesmen Nasional, kebijakan Assesmen Kompetensi Minimum, kebijakan penyederhanaan RPP, kebijakan PPDB Zonasi, Kebijakan penyaluran dana BOS, kebijakan penggunaan dana BOS, kebijakan nilai harga satuan dana BOS, dan kebijakan pelaporan dana BOS. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara, dan dokumentasi, dan observasi sehingga melalui upaya ini diyakini dapat mengetahui tingkat permasalahan dan upaya untuk mengatasi masalah dana BOS pada SMA Negeri 25 Bandung.

**Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi di lingkungan SMA Negeri 25 Bandung pada bulan Januari 2021 hingga Desember 2021. Peneliti melakukan wawancara kepada para informan yaitu Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Guru, Komite Sekolah, dan Orang Tua Siswa di SMA Negeri 25 Bandung. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini berupa Juknis BOS 2021, RKAS 2021, Sistem Informasi BOS Salur, dan Buku Saku Merdeka Belajar.

**Simpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian yang terlah diuraikan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

* + - 1. SMA Negeri 25 Bandung sudah memenuhi prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS. Dengan pemenuhan prinsip-prinsip dana BOS sudah menunjukan bahwa pengelolaannya dilaksanakan dengan baik.
      2. SMA Negeri 25 Bandung sudah memenuhi kebijakan Merdeka Belajar Episode 1. Dengan pemenuhan kebijakan ini SMA Negeri 25 Bandung ikut melaksanakan kebijakan baru Kemendikbud dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan.
      3. SMA Negeri 25 Bandung sudah memenuhi kebijakan Merdeka Belajar Episode 3. Dengan pemenuhan kebijakan ini SMA Negeri 25 Bandung ikut melaksanakan kebijakan baru Kemendikbud dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

**Saran**

Rekomendasi penelitian ini merupakan saran peneliti untuk bisa dijadikan pertimbangan oleh pihak Sekolah dan Dinas Pendidikan dalam memaksimalkan tata kelola dana BOS dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dalam menyongsong merdeka belajar

Publikasi dana BOS agar lebih di permudah. Misalnya sekolah meng-upload pelaporan dana BOS di situs resmi sekolah.

Harga besaran satuan siswa dinilai masih belum mencukupi dalam pemenuhan standarisasi pendidikan

Kegiatan Assesmen Nasional agar lebih representatif. Ketentuan siswa yang mengikuti Assesmen Nasional ditentukan langsung oleh pihak sekolah.

**Daftar Pustaka**

Amiini, N. S. 2016. Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) di SMA Negeri Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2014. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Arikunto, S. (2014). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Arwildayanto, Lamatenggo, N., & Sumar, W. T. 2017. Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: Widya Padjadjaran.

Baro’ah, Siti. 2020. Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan. Jurnal Tawadhu, 4 (1) 1063-1073.

Chabibie, M. Hasan. 2020. Merdeka Belajar di Tengah Pandemi Covid-19. Diakses pada 1 Mei 2021 dari https://www.timesindonesia.co.id/read/news/266182/merdeka-belajar-di-tengah-pandemi-covid19

Direktorat Sekolah Dasar. 2021. Merdeka Belajar Episode 1-11. Diakses pada tanggal 3 Juni 2021 dari http://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/merdeka-belajar-episode-1-11

Kementerian Keuangan RI. 2020. Merdeka Belajar Episode 3: Penyaluran Dana BOS Tahun 2020. Diakses pada 7 Mei 2021 dari http://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kendari/id/data-publikasi/berita-terbaru/2833-merdeka-belajar-episode-3-penyaluran-dana-bos-tahun-2020.html

Kementerian Keuangan RI. 2020. Permasalahan dan Solusi untuk Penyaluran Dana BOS 2020. Diakses pada tanggal 7 Juni 2020 dari https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/permasalahan-dan-solusi-untuk-penyaluran-dana-bos-2020/

Matin. 2014. Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Masditou. 2017. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan yang Bermutu. Jurnal ANSIRU PAI, 1, 120.

Melicher, R. W., & Norton, E. A. 2016. Intoduction to Finance. Colorado: John Wiley & Sons, Inc.

Mukhtar. 2013. Metode Praktis Penelitian Kualitatif. Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press).

Mulyono. 2016. Konsep Pembiayaan Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Musthafa. 2017. Manajemen Keuangan. Yogyakarta. CV. Andi Offset.

Peraturan Pemerintah.

Rahman, Majid. 2021. Program Merdeka Belajar Solusi Tingkatkan Kualitas Pendidikan. Diakses pada 2 Mei 2021 dari https://prosesnews.id/program-merdeka-belajar-solusi-tingkatkan-kualitas-pendidikan/